

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- _____. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Aminah. 2002. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pengusaha dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan: Studi Kasus Industri Kecil Batik di Kotamadya Pekalongan*. Tesis tidak diterbitkan. (Online). (www.lontar.ui.ac.id//opac/themes/libri2/detail, diakses 3 Juni 2011).
- Asshiddiqie, J. 2009. *Solusi Huku*. (Online). (www.solusihukum.com, diakses 20 Agustus 2011).
- _____. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros. 2010. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 Kabupaten Maros*. Maros.
- Bentham, J. 1979. *Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Terjemahan oleh Nurhadi. 2010. Bandung: Nusamedia.
- Catanese, A.J. dan Synder, J.C. 1997. *Perencanaan Kota*. Jakarta: Erlangga.
- Chapin, F.S. dan Keiser, E. 1979. *Land Use Planning*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hamidi, J. 2011. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Hanarti, M. 1999. *Studi Karakteristik dan Kebutuhan Ruang Aktivitas Perdagangan dan Jasa Sektor Informal di Kawasan Pusat Perdagangan Johar Semarang*. Tugas akhir tidak diterbitkan. Semarang: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.
- Herlianto. 1986. *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*. Bandung: Alumni.
- Ibrahim, J. 2009. *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum*. Surabaya: ITSpress.

- Indosman, R. 2008. *Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Dalam Penegakan Peraturan Daerah*. Tesis tidak diterbitkan. (Online), ([www.library.unib.ac.id/koleksi/Romadan% 20Indosman-FH-Magis-2009. Pdf](http://www.library.unib.ac.id/koleksi/Romadan%20Indosman-FH-Magis-2009.Pdf), diakses 3 Juni 2011).
- Juwana, H. 2006. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen Bagi Solusi di Indonesia. Varia Peradilan*. edisi Maret 2006.
- Jones, S. 1990. *Location, Location, Location*. Ontario: International Thamsom Publising.
- Kusumaatmadja, M. 2000. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*. Cetakan keempat. Jakarta: CV.Putra A Bardin.
- Manan, B. 2005. *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. Varia Peradilan*. Edisi Nopember 2005.
- Manning, C. dan Effendi, T.N. 1996. *Urbanisasi dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- McGee, T.G. dan Yeung, Y. M. 1997. *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*. Ottawa: International Development Research Centre.
- Muchsin. 2005. *Menyongsong Kehadiran Pengadilan Hubungan Industrial. Varia Peradilan*, edisi Nopember 2005.
- Mustafa, B. 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*. 2010. Bandung: Fokus Media.
- Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Penataan Pedagang kaki lima*. 2006. Maros: Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Maros.
- Rachbini, Didik J. dan Abdul Hamid. 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan*. Jakarta: LP3ES.
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros. 2010. *Rencana Strategis 2010-2015*. Maros.

- Rosidah, N. 2006. *Manfaat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Upaya Penegakan Peraturan Daerah*, (Online). (<http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=77239>, diakses 3 Juni 2011).
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., Panuju, D.R. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Seidman, R.,B. 1972. *Law and Development: A general model. Law and Society Review*. Jilid VII. New York: Random House.
- Shirvani, H. 1985. *The Urban Design Process*. New York: Van Nostrand Reinhold Company, Inc.
- Simanjutak, P.J. 1989. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soekantoe, S. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman, S. 2006. *Malioboro*. Yogyakarta: PT Mitra Tata Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. 2010. Bandung: Fokus Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. 2010. Bandung: Fokus Media.
- United Nation Development Programme (UNDP). 2006. *Human Development Report*. New York: Oxford University Press.
- Widjajanti, R. 2000. *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang kaki lima pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpang Lima Semarang)*. Disertasi tidak diterbitkan. Bandung: Bidang Khusus Perencanaan Kota Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jenis dan sumber data

No	Tujuan Penelitian	Variabel	Data dan Informasi	Sumber Data	Teknik Pengambilan Data	Analisis Data
1.	Menjelaskan karakteristik pedagang kaki lima dalam melakukan aktivitasnya di Pasar Sentral Maros.	Profil PKL	Asal, lamanya berdagang, pendidikan akhir, alasan, dan kepemilikan modal PKL.	Data Primer: 1. Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros; 2. Pedagang Kaki Lima. Data Sekunder: Daftar Registrasi Pedagang Kaki Lima	Wawancara mendalam Studi dokumentasi	Deskriptif Kualitatif
		Lokasi PKL	Titik lokasi PKL, ciri khas lokasi, dan alasan memilih lokasi oleh PKL.	Data Primer: 1. Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros; 2. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Pedagang Kaki Lima.	Wawancara mendalam dan observasi.	Deskriptif Kualitatif

No	Tujuan Penelitian	Variabel	Data dan Informasi	Sumber Data	Teknik Pengambilan Data	Analisis Data
				Data Sekunder: Daftar Lokasi Pedagang Kaki Lima	Studi dokumentasi	
		Aktivitas PKL	Sarana fisik, jenis barang/jasa, waktu pelayanan, sifat pelayanan, fungsi pelayanan, dan pola penyebaran PKL.	Data Primer: 1. Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros; 2. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Pedagang Kaki Lima. Data Sekunder: Daftar Jenis Barang/ Jasa Pedagang Kaki Lima	Wawancara mendalam dan observasi. Studi dokumentasi	Deskriptif Kualitatif
2.	Menjelaskan penegakan Perda yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros dalam upaya penertiban	Sumber daya dalam penegakan Perda	Data Primer: 1. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan; 2. Pihak-pihak yang terlibat; 3. Jumlah dana.	Data Primer: 1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja.	Wawancara mendalam	Deskriptif Kualitatif
			Data Primer: 1. Penetapan Lokasi dan	Data Primer: 1. Kepala Sekretariat	Wawancara mendalam dan	Deskriptif Kualitatif

No	Tujuan Penelitian	Variabel	Data dan Informasi	Sumber Data	Teknik Pengambilan Data	Analisis Data
	pedagang kaki lima	Proses Penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2006	<p>objek sasaran penegakan Perda ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bentuk-bentuk penegakan Perda ; 3. Tata cara/prosedur penegakan Perda . <p>Data Sekunder</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wewenang dan tugas Polisi pamong praja; 2. aturan tentang pedagang kaki lima di dalam Perda ; 3. Sanksi bagi pelanggar Perda . 	<p>Satuan Polisi Pamong Praja;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Kepala Bidang Tata Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Kepala Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja; 5. Petugas Polisi Pamong Praja; 6. Pedagang Kaki Lima. <p>Data Sekunder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima; 2. Laporan Pelaksanaan Tugas; 3. Peta/ denah lokasi PKL. 	<p>observasi.</p> <p>Studi dokumentasi</p>	

No	Tujuan Penelitian	Variabel	Data dan Informasi	Sumber Data	Teknik Pengambilan Data	Analisis Data
		Hasil	Data Sekunder 1. Jumlah kasus pelanggaran; 2. Jumlah PKL yang ditindak secara hukum.	Data Sekunder 1. Berita Acara Pelanggaran; 2. Laporan pelaksanaan Tugas;	Studi dokumentasi	Deskriptif Kualitatif
3.	Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Perda yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros	Tingkat Kesadaran Hukum	Data Primer: 1. Pengetahuan PKL terhadap keberadaan Perda ; 2. Pengetahuan PKL terhadap Isi Perda ; 3. Penilaian PKL terhadap Perda ; 4. Kesesuaian perilaku PKL dengan Perda ; 5. Sumber Pengetahuan PKL terhadap Perda .	Data Primer: Pedagang Kaki Lima.	Wawancara mendalam dan observasi	Deskriptif Kualitatif
		Tingkat Kepatuhan Hukum	Data Primer: Alasan patuh atau tidak patuh pada Perda . Data Sekunder: 1. Jumlah Pelanggar Perda ; 2. Jumlah pelanggar yang dibina; 3. Jumlah pelanggar yang ditindak secara hukum.	Data Primer: Pedagang Kaki Lima. Data Sekunder: Laporan Kegiatan.	Wawancara mendalam Studi dokumentasi	Deskriptif Kualitatif

No	Tujuan Penelitian	Variabel	Data dan Informasi	Sumber Data	Teknik Pengambilan Data	Analisis Data
		Dana	Data Sekunder: Rasio jumlah alokasi dana dengan kegiatan.	Data Sekunder: DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros.	Studi dokumentasi	Deskriptif Kualitatif
		Petugas Satuan Polisi Pamong Praja	Data Primer: 1. Pemahaman Petugas Terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2006; 2. Perilaku petugas. Data Sekunder: 1. Jumlah Pol PP yang terlibat dalam penegakan Perda ; 2. Jumlah petugas yang telah mengikuti diklat; 3. Jumlah PPNS; 4. Latar belakang pendidikan petugas Pol PP.	Data Primer: 1. Petugas Pol PP; 2. Pedagang Kaki Lima. Data Sekunder: 1. Laporan Kegiatan; 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros.	Wawancara mendalam dan observasi Studi Dokumentasi	Deskriptif Kualitatif
		Peraturan perundang-undangan	Data Sekunder: 1. Wewenang Pol PP dalam penataan PKL; 2. Pengaturan tentang aktivitas PKL; 3. Pengaturan tentang Sanksi.	Data Sekunder: Perda Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima	Studi Dokumentasi	Deskriptif Kualitatif

No	Tujuan Penelitian	Variabel	Data dan Informasi	Sumber Data	Teknik Pengambilan Data	Analisis Data
		Sarana Prasarana	Data Sekunder: 1. Jumlah Pos Pengawas; 2. Jumlah Kendaraan Operasional; 3. Jumlah Alat Pengamanan; 4. Tempat Relokasi PKL.	Data Sekunder: 1. Daftar Inventarisir sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros; 2. Surat-surat keputusan Bupati Maros.	Studi Dokumentasi	Deskriptif Kualitatif

Lampiran 2. Dokumentasi penelitian lapangan



(Wawancara Dengan Kabid Trantibum Dan Kabid Tata Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros pada Tanggal 2 Nopember 2011)



(Wawancara Dengan Salah Satu Petugas Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros Pada Tanggal 2 Nopember 2011)



(Wawancara Dengan Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros Pada Tanggal 4 Nopember 2011)



(Wawancara dengan salah satu pedagang kaki lima di Jl. Dahlia Pasar Sentral Maros Pada Tanggal 12 Nopember 2011)



(Wawancara dengan salah satu pedagang kaki lima di Tempat Relokasi Blok D Pasar Sentral Maros Pada Tanggal 12 Nopember 2011)



(Kondisi Pedagang Kaki Lima di Jalan Dahlia Pada Tanggal 12 Nopember 2011)



(Kondisi Pedagang Kaki Lima di Tempat Relokasi Pada Tanggal 12 Nopember 2011)



(Wawancara dengan salah satu pedagang kaki lima di Jl. Cempaka Pasar Sentral Maros Pada Tanggal 13 Nopember 2011)



(Wawancara dengan salah satu pedagang kaki lima di JL. Maros-Pangkep Pada Tanggal 13 Nopember 2011)

Lampiran 3. Daftar informan

No	Tanggal/Pukul Wawancara	Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir/Umur	Pekerjaan/Jabatan	Alamat
1	25 Oktober 2011/ 13:20	Drs.Eldrin Saleh,M.Si	LK	Makassar 03/07/1972	Polisi Pamong Praja/ Sekretaris	Jl. Sembakung No. 18 Bukit Baruga Antang Makassar
	01 Nopember 2011/ 13:15					
2	02 Nopember 2011/ 9:32	Drs. H. Suharto	LK	Maros 19/10/1963	Polisi Pamong Praja/ Kabid Trantibum	Perumnas Tumalia Blok D/87 Maros
3	02 Nopember 2011/ 9:32	Dra. Surianah	PR	Rappang 10/11/1965	Polisi Pamong Praja/ Kabid Tata Operasional	BTN Hamzy Blok V2/4 Makassar
4	02 Nopember 2011/ 8:40	Waliuddin Hilal,AKS	LK	Maros 17/07/1972	Polisi Pamong Praja/Kasi. Penegakan Peraturan PerUndang- Undangan	Jl. Bambu Runcing 48 Labuang Maros
5	02 Nopember 2011/ 11:47	Idgan	LK	Maros 09/05/1972	Polisi Pamong Praja	Kompleks.RSUD Maros
6	27 Oktober 2011/ 9:45	Jhony Syakhriil, SH	LK	Maros 06/08/1968	Polisi Pamong Praja	BTN Maccopa Indah Blok B No.119
	02 Nopember 2011/ 11:36					
7	02 Nopember 2011/ 11:59	Abdul Malik	LK	Maros 20/05/1976	Polisi Pamong Praja	Sakeang
8	04 Nopember 2011/ 8:58	H. Syamsir, SE	LK	Maros 52	Kabid Perdagangan Dinas KOPERINDAG	Jl.Poros Kariango, Batang Ase Kec. Mandai Maros
9	12 Nopember 2011/ 8:25	Hj. Muna	PR	Maros 55	Pedagang Sayuran (PKL Relokasi Blok E)	Jl. Samudera Kel. Ale Pulia Kec. Turikale Maros

No	Tanggal/Pukul Wawancara	Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir/Umur		Pekerjaan/Jabatan	Alamat
10	12 Nopember 2011/ 8:57	Lukman	LK	Maros	24	Pedagang Pisang (PKL Relokasi Blok D)	Jl. Tambasi Kel. Sangalea Kec. Turikale Maros
11	12 Nopember 2011/ 9:32	Hj. Minah	PR	Ujung Pandang	39	Pedagang Campuran (PKL Jl.Dahlia)	Jl. Dahlia Kel. Alire Tengah Kec. Turikale Maros
12	12 Nopember 2011/ 10:05	Arman	LK	Maros	30	Pedagang Elektronik (PKL Relokasi Blok B)	Jl. Batang Ase Kel. Bontoa Kec. Mandai Mandai
13	12 Nopember 2011/ 10:58	Cucu	LK	Maros	44	Pedagang Buah (PKL Relokasi Blok D)	Jl. Dahlia Kel. Alire Tengah Kec. Turikale Maros
14	13 Nopember 2011/ 8:58	Ramli	LK	Maros	35	Pedagang Buah (PKL Jl.Maros-Pangkep)	Perum. Griya Maros Indah Maccopa Kec. Mandai Maros
15	13 Nopember 2011/ 9:30	Sultan	LK	Maros	32	Pedagang Bakso (PKL Jl.Cempaka)	Jl. Tanggul Kota Kel.Baju Bodoa Kec.Turikale Maros
16	13 Nopember 2011/ 10:05	Salma	PR	Maros	33	Pedagang Pakaian (PKL Jl.Cempaka)	Komp. Pasar Maros Kel. Aliri Tengah Kec. Turikale Maros
17	13 Nopember 2011/ 10:42	Ibnu Hajar	LK	Maros	19	Pedagang Sayuran (PKL Jl.Cempaka)	Jl. Cempaka Kel.Pallantikan Kec.Turikale Maros
18	13 Nopember 2011/ 11:23	Hawiyah	PR	Maros	45	Pedagang Minuman (PKL Jl.Cempaka)	Jl.Tanggul Kota. Kel. Baju Bodoa Kec.Turikale Maros

Lampiran 4. Daftar pertanyaan



**DAFTAR PERTANYAAN
(Informan Polisi Pamong Praja)**

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Umur :

Alamat :

.....

.....

Jenis Kelamin : Laki – Laki Perempuan

HP/ Telp :

I. PERSEPSI POLISI PAMONG PRAJA TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

1. Menurut Bapak/ Ibu/ Saudara apakah yang dimaksud dengan pedagang kaki lima?
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah pedagang kaki lima memberi manfaat untuk pembangunan Kabupaten Maros?
3. Apa alasan jawaban Bapak/ Ibu/ Saudara tersebut?
4. Menurut Bapak/ Ibu/ Saudara bagaimanakah aktivitas pedagang kaki lima yang telah berjalan selama ini?
5. Menurut Bapak/ Ibu/ Saudara apakah aktivitas pedagang kaki lima perlu dipertahankan?
6. Apa alasan jawaban Bapak/ Ibu/ Saudara tersebut?

II. KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

7. Apakah ada kebijakan yang ditetapkan dalam mengatur pedagang kaki lima? *(Jika ada, lanjut ke dua nomor berikutnya)*
8. Apa saja kebijakan-kebijakan tersebut?
9. Bagaimanakah kebijakan-kebijakan tersebut ditetapkan? Dan siapa sajakah yang terlibat?

III. PENEGAKAN PERDA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

10. Apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang penataan pedagang kaki lima? *(Jika ada, lanjut ke nomor berikutnya)*
11. Sebutkan perda yang mengatur hal tersebut?
12. Siapa sajakah yang terlibat dalam penegakan perda tersebut dan berapakah jumlah dari pihak-pihak yang terlibat?
13. Siapakah yang menjadi objek sasaran dari penegakan Perda tersebut? Dimanakah lokasinya?
14. Bagaimanakah proses penetapan lokasi dan objek sasaran penegakan perda tersebut?
15. Berapakah jumlah dana yang tersedia untuk penegakan perda tersebut?
16. Untuk keperluan apa sajakah dana tersebut?
17. Apakah dana yang tersedia saat ini telah memadai untuk penegakan perda tersebut?
18. Sarana dan prasarana apa sajakah yang telah tersedia untuk penegakan perda tersebut?
19. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia telah memadai untuk penegakan perda?
20. Menurut Bapak/Ibu/Saudara bagaimanakah wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada Satuan polisi pamong praja dalam perda tersebut?
21. Apa sajakah bentuk-bentuk penegakan perda yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros dalam penataan pedagang kaki lima?
22. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan dari masing-masing bentuk penegakan perda tersebut?
23. Apakah bentuk tindakan hukum bagi PKL yang melanggar perda? *(Jika ada, lanjut ke satu nomor berikutnya)*
24. Bagaimanakah proses tindakan hukum tersebut dilakukan?
25. Berapakah jumlah kasus pelanggaran perda yang telah diterima dan diselesaikan saat ini?
26. Berapakah jumlah PKL yang berhasil ditertibkan dari total PKL yang ada?

=====TERIMAKASIH=====



**DAFTAR PERTANYAAN
(Informan Pedagang Kaki Lima)**

Nama : -----

Umur : -----

Pekerjaan : -----

Alamat : -----

Jenis Kelamin : Laki – Laki Perempuan

HP/ Telp : -----

1. Darimanakah Bapak/ Ibu/ Saudara berasal?
2. Apakah Pendidikan terakhir Bapak/ Ibu/ Saudara?
3. Berapa lama Bapak/ Ibu/ Saudara telah berdagang disini?
4. Apakah pekerjaan Bapak/ Ibu/ Saudara sebelumnya?
5. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara memiliki kerabat/famili yang menjadi pedagang kaki lima?
6. Apa alasan Bapak/ Ibu/ Saudara menjadi pedagang kaki lima?
7. Apakah modal usaha ini milik Bapak/ Ibu/ Saudara?
8. Pukul berapa Bapak/ Ibu/ Saudara mulai berjualan?
9. Pukul berapa Bapak/ Ibu/ Saudara menutup jualan?
10. Menurut Bapak/ Ibu/ Saudara, pada pukul berapa pembeli banyak berdatangan?
11. Sarana apakah yang Bapak/ Ibu/ Saudara gunakan untuk berdagang? Mengapa?
12. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara tahu bahwa di tempat ini dilarang berjualan? Jika ya, darimana sumbernya?
13. Apa alasan Bapak/ Ibu/ Saudara berjualan disini?
14. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara mengetahui adanya perda tentang penataan pedagang kaki lima? Jika ya, darimana sumbernya?
15. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara tahu isi peraturan daerah tersebut?
16. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara setuju dengan keberadaan perda

tersebut?

17. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara pernah ditertipkan oleh petugas Satpol PP? Jika ya, berapa kali?
18. Bagaimanakah pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara mengenai tindakan petugas Pol PP dalam menertipkan PKL?
19. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara setuju dengan kebijakan pemerintah merelokasi PKL ke tempat yang lain? Apa alasannya?
20. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara termasuk PKL yang direlokasi?
21. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara pernah diikut sertakan dalam pengambilan keputusan untuk merelokasi PKL? Jika ya berapa kali?
22. Apakah relokasi memberi pengaruh pada pendapatan Bapak/ Ibu/ Saudara? Apa alasannya?
23. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara ingin kembali berjualan di tempat semula sebelum direlokasi? Apa alasannya?

=====TERIMAKASIH=====

Lampiran 5. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2006
Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima